

BAB V KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

Sistem Informasi merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam mengelola sebuah data guna memberi keefektifan dalam hal penggunaan waktu. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menggunakan sistem tersebut dalam mengelola data sebagai bentuk proses administrasi berbasis digital. Sistem informasi yang ada pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menggunakan *Case Management System (CMS)* adalah pengelolaan, penyelesaian, penanganan perkara. Tujuan penerapan sistem informasi ini adalah untuk membantu mempercepat proses penanganan perkara. Sistem ini digunakan untuk menginput data yang berupa digital agar dapat disimpan menjadi arsip digital selain itu data-data perkara tersebut dapat dengan mudah dibagikan sehingga memudahkan proses penanganan perkara.

Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terdapat sistem informasi manajemen dalam menangani sebuah perkara. Sistem informasi atau sering disebut dengan simkari CMS itu awal pada proses menangani perkara biasanya terjadi setelah Kejaksaan menerima SPDP dari Penyidik, lalu oleh kejaksaan ditunjuk Jaksa Peneliti untuk meneliti perkembangan kasus tersebut sehingga kasus tersebut bisa diproses melalui aplikasi simkari CMS. segala hal mengenai perkara tahap awal pemberitahuan penyidikan sampai selesai penuntutan dan seluruh proses administrasi diolah melalui Simkari CMS sehingga bisa dipantau dari Kejaksaan Agung dan bisa diakses kapan saja. Simkari CMS ini membantu kinerja pegawai yang ada ini sehingga transparansi dan kerja menjadi lebih cepat dan tepat.

Dalam menyelesaikan suatu perkara biasanya sering terdapat kendala dalam prosesnya. Dalam hal ini kendala yang sering terjadi karena kurang pemahaman tentang penggunaan

perangkat lunak atau sering salah memasukkan data dalam mengakses sistem informasi tersebut sehingga proses penyelesaian terhadap suatu perkara sering menjadi lambat.

5.2 Saran

Sistem Informasi perkara akan tetap berjalan berdasarkan ketentuan yang telah diatur sebagaimana mestinya. Sistem tersebut akan terus berkembang menjadi lebih baik agar menjadi efektif dan efisien dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaan penanganan perkara akan lebih baik jika pada proses tersebut diawasi kinerja nya agar tidak terjadi kelalaian dalam proses nya terutama kepada staff anggota tindak pidana untuk tidak menumpuk-numpuk file atau perkara yang akan untuk diinput . Membangun komunikasi yang baik akan membantu proses penanganan menjadi lebih mudah sehingga tidak terjadi kesalahan yang akan mengakibatkan perkara menjadi terbengkalai.

